



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIVAL ABDUL JABAR
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 989523

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.114.000.000**

1. Tanah Seluas 5.130 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/153 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 549 m2 di KAB / KOTA BATURAJA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah Seluas 595 m2 di KAB / KOTA BATURAJA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 55.000 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
7. Tanah Seluas 40.000 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **95.000.000**

1. MOTOR, HONDA RODA DUA/BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA TYPE V / MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 14.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 430.305.035

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.653.305.035

III. HUTANG

Rp. 335.193.950

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.318.111.085

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.